

# Ketua LPD Selat Resmi Tersangka

★ Dugaan Korupsi Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

**"Dana bantuan yang cair ketika itu Rp 300 juta, namun ditemukan ada indikasi penyelewengan, dana tidak sampai sesuai dengan nama yang diajukan,"**

BANGLI, NusaBali

Kejaksanaan Negeri (Kejari) menetapkan salah satu pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selat, Desa Selat, Kecamatan Susut, Bangli sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana Usaha

Ekonomi Produktif (UEP). Tersangka tersebut adalah Ketua LPD Selat, inisial Ni Luh N, 40, asal Banjar Selat Peken, Desa Selat.

Dikonfirmasi Kejari Bangli Ida Ayu Ratnasari Dewi melalui Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan Jaelani, menjelaskan bila dana UEP bersumber dari pusat melalui program pengembangan kecamatan (PPK) pada tahun 2014. Dimana dalam program tersebut sasarannya ada LPD.

Pada tahun 2013 LPD Selat memohon atau mengajukan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD), agar bisa memperoleh dana UEP tersebut. "BKS-LPD ini sebagai penyalur, dalam permohonan tercantum 21 orang. Dalam pengajuannya tersebut tertera pula usaha

yang akan dikembangkan," bebrnya Senin (5/6).

Selanjutnya dana tersebut cair ke LPD Selat, namun dana tidak sampai pada orang-orang yang sebelumnya tercantum dalam pengajuan. "Dana bantuan yang cair ketika itu Rp 300 juta, namun ditemukan ada indikasi penyelewengan, dana tidak sampai sesuai dengan nama yang diajukan," jelasnya. Akibatnya terjadi kerugian negara sebesar Rp 225 juta, sesuai dengan hasil audit BPKP.

Disebutkan baru ada satu tersangka yang ditetapkan yang mana tersangka tersebut adalah pengurus LPD Selat. Disinggung terkait penggunaan dana tersebut, Elan Jaelani enggan memberikan keterangan yang detail ter-

masuk detail peran tersangka. "Itu sudah masuk materi persidangan, untuk sementara kami belum bisa sampaikan," ujarnya seraya mengatakan tersangka tidak ditahan.

Ditanya terkait penambahan tersangka Elan Jaelani mengatakan masih dimungkinkan ada tersangka lain, bila mana memang cukup bukti. Disisi lain dari tersangka belum ada komunikasi untuk melakukan pengembalian kerugian negara akibat penyelewengan tersebut. "Belum ada pembicaraan atau etikad dari tersangka untuk melakukan pengembalian," ungkapnya seraya mengatakan tersangka disangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. e



• NUSABALI/RI  
KASI Pidsus Kejari Bangli, Elan Jaelani

Edisi : Rabu, 6 Juni 2018

Hal : 5



## Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP Enam Kali Berturut-turut

**BADAN** Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bali melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota se-Bali Tahun Anggaran 2017 di ruang pertemuan kantor BPK-RI Perwakilan Bali, Senin (28/5). Bupati/wali kota se-Bali bersama ketua DPRD hadir dalam kesempatan tersebut.

Penyerahan LHP pertama kali diserahkan kepada Pemkot Denpasar dan dilanjutkan kabupeten lainnya oleh Ketua BPK-RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho. LHP kepada Pemkot Denpasar diterima langsung Plt. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede. Pada tahun ini, untuk keenam kalinya Pemkot Denpasar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak tahun 2012.

Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyatakan, seluruh kabupaten/kota se-Bali berhasil memperoleh opini WTP. Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2017 kabupaten/kota se-Bali kepada ketua DPRD dan kepala daerah ini untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa

laporan hasil pemeriksaan atas LKPD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan sejak menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan merupakan tahun ketiga penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Seluruhnya telah melaporkan tepat waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dengan laporan yang diserahkan sebanyak tiga laporan. Terdiri dari laporan pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2017, laporan sistem pengendalian intern, dan laporan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Salah satu pemeriksaan yang dilakukan BPK yakni laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah yang menghasilkan opini atas laporan keuangan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dengan pemberian opini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. "Kami mengucapkan selamat terhadap prestasi yang dicapai, dan mengharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Plt. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menyam-

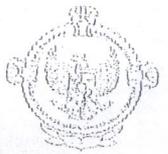
paikan ucapan terima kasih kepada BPK-RI beserta jajarannya yang telah memberikan bimbingan selama ini. Hal ini memberikan dampak pada pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya, serta dengan keberhasilan meraih opini WTP dapat menjadikan semangat bagi aparaturnya Pemkot Denpasar. Diharapkan dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Kota Denpasar.

Sementara itu, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengatakan, laporan keuangan adalah hasil kerja keras kabupaten/kota yang disusun dalam laporan keuangan daerah. "Mudah-mudahan hasil laporan BPK memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita bersama. Bahwa opini bukan tujuan akhir dari laporan keuangan daerah, tetapi langkah awal untuk perbaikan-perbaikan yang transparan dan akuntabel serta akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. DPRD mendorong para bupati/wali kota untuk mengambil perbaikan sesuai rekomendasi dari BPK-RI perwakilan Bali," ujarnya. (ad1010)



**MENERIMA** - Plt. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede menerima LHP dan LKPD Tahun Anggaran 2017 dari Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho di ruang pertemuan BPK-RI Perwakilan Bali, Senin (28/5) lalu.



## Bali Raih WTP Lima Kali Secara Beruntun

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

28 Mei 2018 lalu.

Bagi Pemprov Bali, ini untuk kelima kalinya secara beruntun memperoleh opini WTA dari BPK. Sebelumnya, WTP dari BPK diperoleh Pemprov Bali atas audit LKPD Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, dan 2016. Semua predikat WTP ini diraih dalam periode kedua kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Sebelumnya, Bali sempat tiga kali beruntun terpaku dengan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, yakni atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012.

Prestasi WTP atas audit LKPD Tahun Anggaran 2017 tersebut diumumkan oleh anggota VI BPK RI, Dr Harry Azhar Asis MA, dalam Sidang Paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (28/5). Kemudian, piagam WTP diserahkan kepada Gubernur Made Mangku Pastika yang didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.

Dr Harry Azhar Asis MA menyatakan, sesuai amanah dari UU Nomor 15 Tahun 2004 atau UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, BPK memberikan laporan atas pemeriksaan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan opini, dengan memperhatikan standarisasi akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan dengan perundang-undangan, serta pengendalian internal. "Hari ini hasil pemeriksaan BPK kami serahkan kepada Gubernur dan DPRD," ujar Auditor BPK kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini.

Menurut Harry Azhar, ada pelaporan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas APBD 2017, LHP atas pengendalian internal, dan LHP atas kepatuhan perundang-undangan. Sesuai dengan batas waktu dan mengacu UU, 60 hari sejak diserahkan kepada Gubernur oleh BPK, harus ada tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Laporan Keuangan Pemprov Bali Tahun Anggaran 2017 disusun atas standar akuntansi pemerintah berbasis Akrua, dalam tahun ketiga penerapan standar akuntansi berbasis Akrua. "Jumlah laporan keuangan terdiri dari 7 dasar penyusunan, yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan ekuitas, dan catatan atas keuangan," tegas Harry Azhar.

### HASIL TEMUAN BPK TAHUN 2017

- Kepemilikan Saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala belum jelas
- Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya tertib
- Pergub Bali tentang Harga Satuan Provinsi tentang besaran harga sewa kendaraan belum memadai
- Penataan aset Pemprov Bali belum sepenuhnya tertib

Prestasi WTP yang diraih Pemprov Bali kali ini termasuk sempurna dibandingkan dengan hasil pemeriksaan di provinsi lainnya. Sebab, tingkat kesejahteraan masyarakat Bali mengembirakan. Indikator kesejahteraan itu adalah perekonomian Bali tumbuh 6,24 persen di tahun 2016, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen.

Selain itu, prosentase penduduk miskin di Bali cenderung menurun di mana tahun 2017 sebesar 4,14 persen atau jauh lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,12 persen. Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali cukup bagus, di mana angka pengangguran terbuka tahun 2017 hanya 1,48 persen atau jauh dari rata-rata nasional sebesar 5,5 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bali tahun 2017 menunjukkan angka 74,30 atau di atas rata-rata nasional sebesar 70,81 persen.

"Gini ratio (angka ketimpangan pendapatan) di Bali 0,379 persen, lebih rendah dari nasional sebesar 0,391 persen. Kami BPK dapat menyampaikan hasil kunjungan di beberapa provinsi, mereka (provinsi luar Bali) memang meraih WTP, tapi rata-rata indikator kemakmuran hanya 1 atau 2 item dipenuhi di atas rata-rata nasional. Sedangkan Bali, dari 4 indikator kemakmuran yang dipenuhi, semuanya berada di atas rata-rata nasional," tandas Harry Azhar.

Kendati meraih predikat WTP dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2017, namun masih ada beberapa masalah yang ditemukan dan harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Bali. Pertama, masalah kepemilikan saham Pemprov Bali pada PT Mergantaka Mandala di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar. Kedua, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya tertib. Ketiga, Pergub Bali tentang besaran harga sewa kendaraan belum memadai. Keempat, penataan aset Pemprov Bali belum sepenuhnya

tertib.

Harry Azhar juga mengingatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan hasil pemungutan pajak dari rakyat oleh Pemprov Bali. "APBD Bali ini harus dibelanjakan sepenuhnya dengan bertanggung jawab dan dengan baik. Kalau tidak, itu namanya nggak menghormati diri sendiri dan orang lain, karena uang yang dikeluarkan membayar pajak oleh rakyat adalah untuk rakyat," tegas mantan Tim Ahli Ekonomi MPR ini.

BPK meminta ada tindak lanjut dari hasil temuan paling lambat 60 hari sejak hasil pemeriksaan diterima Pemprov Bali. "Sesuai dengan pasal 20 ayat 3 UU Nomor 15 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemprov Bali wajib menindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari sejak hasil BPK RI diterima. Kami ingatkan kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD Bali menindaklanjutinya. Kalau tidak, bisa menjadi ranah hukum," tegas Harry Azhar yang notabene mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (membidangi keuangan).

Sementara itu, Gubernur Made Mangku Pastika mengatakan raihannya WTP sebanyak 5 kali secara berturut-turut ini adalah hasil kerja bersama. "Ya, kami apresiasi seluruh elemen, karena ini adalah hasil kerja keras bersama. Hal ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata kelola keuangan di Provinsi Bali," ujar Gubernur Pastika se usai Sidang Paripurna DPRD Bali dengan agenda penyerahan hasil audit LKPD Tahun Anggaran 2017 di Gedung Dewan, Senin siang.

Soal adanya temuan-temuan oleh BPK, menurut Pastika, semuanya akan ditindaklanjuti, termasuk soal kepemilikan saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala---perusahaan yang kelola Rumah Potong Hewan (RPH) Temesi di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar. Menurut Pastika, Pemprov Bali kemungkinan akan likuidasi kepemilikan saham di PT Mergantaka Mandala, yang berlaku sejak 15 Juli 2006 di era Gubernur Dewa Made Beratha.

"RPH Temesi itu kini tidak beroperasi. RPH tersebut hanya beberapa tahun saja beroperasi, habis itu mangkrak. Ada salah hitung dan perencanaan di sini. Kami kemungkinan ambil solusi, yakni likuidasi. Tapi, kita kaji dulu aturannya, bicarakan dengan pemerintah pusat dan Pemkab Gianyar. Karena ada 3 pihak di sini, yakni pusat, Pemprov Bali, dan Pemkab Gianyar," tegas mantan Asisten Perencanaan Kapolri ini. [nat](#)

Edisi : Sabtu, 2 Juni 2018

Hal : 15



## Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP Enam Kali Berturut-turut

DENPASAR, NusaBali

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bali melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LKPD) se-Bali Tahun Anggaran 2017, Senin (28/5) di ruang pertemuan kantor BPK RI Perwakilan Bali. Bupati/Walikota se-Bali bersama Ketua DPRD hadir dalam kesempatan tersebut.

Penyerahan LHP pertama kali diserahkan kepada Pemkot Denpasar dan dilanjutkan kabupaten lainnya oleh Ketua BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho. LHP kepada Pemkot Denpasar diterima langsung Plt Walikota Denpasar I GN Jaya Negara bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede. Pada tahun ini untuk keenam kalinya Pemkot Denpasar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak Tahun 2012.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyatakan seluruh kabupaten/kota se-Bali berhasil memperoleh opini WTP. LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2017 kabupaten/kota se-Bali kepada ketua DPRD dan kepala daerah. Hal ini untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas LKPD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan sejak menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan merupakan tahun ketiga penerapan akuntansi



Plt Walikota I GN Jaya Negara bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede menerima LHP dan LKPD Tahun Anggaran 2017 dari Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Senin (28/5) di ruang pertemuan BPK RI Perwakilan Bali.

pemerintah berbasis akrual. Seluruhnya telah melaporkan tepat waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dengan laporan yang diserahkan sebanyak tiga laporan. Terdiri dari laporan pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2017, laporan sistem pengendalian intern, dan laporan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Salah satu pemeriksaan yang dilakukan BPK yakni laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah yang menghasilkan opini atas laporan keuangan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan dengan pemberi opini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. "Kami mengucapkan selamat terhadap prestasi yang dicapai, dan mengharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

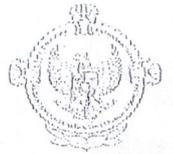
Plt Walikota Denpasar I GN Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI beserta jajarannya yang telah memberikan bimbingan selama ini.

Hal ini memberikan dampak pada pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya, serta dengan keberhasilan meraih opini WTP dapat menjadikan semangat bagi aparatur Pemkot Denpasar. Diharapkan dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Sementara Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengatakan laporan keuangan adalah hasil kerja keras kabupaten/kota yang disusun dalam laporan keuangan daerah. "Mudah-mudahan hasil laporan BPK memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita bersama. Bahwa opini bukan tujuan akhir dari laporan keuangan daerah tetapi langkah awal untuk perbaikan-perbaikan yang transparan dan akuntabel serta akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. DPRD mendorong para bupati/walikota untuk mengambil perbaikan sesuai rekomendasi dari BPK RI perwakilan Bali," ujarnya. @

Edisi : Senin, 4 Juni 2018

Hal : 3



# Buleleng Pertahankan Opini WTP

## ★ Bupati Target Menekan Catatan dari BPK

SINGARAJA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, akhirnya berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), untuk keempat kalinya. Kini, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana pasang target mengurangi hal-hal yang menjadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam pengelolaan keuangan tersebut.

"Tentu ini sebuah keberhasilan, karena selama ini semua pimpinan SKPD bekerja keras dan sangat berhati-hati. Ke depan bukan hanya WTP saja, tetapi saya ingin agar bisa mengurangi hal-hal yang menjadi catatan dari BPK," kata Bupati Agus Suradnyana, saat dikonfirmasi usai pimpin Apel Bendera memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Jumat (1/6), di Kantor Bupati Jalan Pahlawan Singaraja.

Pemkab Buleleng meraih opini WTP pertama, atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2014. Opini itu berhasil dipertahankan secara berturut-turut, untuk pengelolaan keuangan tahun 2015, 2016, dan tahun 2017.

Opini WTP tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI, atas LKPD tahun 2017.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, di Gedung BPK RI Perwakilan Bali, pada Senin



● NUSABALI/SUDIRTA

BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, menerima LHP atas LKPD tahun 2017 dari BPK RI Perwakilan Bali.

(28/5) lalu.

Menurut Bupati Agus Suradnyana, hal-hal yang menjadi catatan dari BPK RI, akan dikurangi agar opini WTP yang diraihnya berkualitas. Sehingga semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Buleleng, diingatkan agar selalu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Hal-hal yang menjadi catatan umumnya kerugian akibat kesalahan administrasi, itu sudah diperbaiki. Ke depan saya inginkan agar catatan itu bisa dikurangi. Bukan semata WTP saja, tetapi bagaimana agar laporan nanti berkualitas," tandasnya.

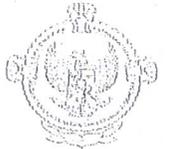
Selain menegaskan target capaian dalam pengelolaan keuangan di tahun 2018, Bupati Agus Suradnyana juga

mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga pimpinan OPD. "Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mengawal pemeriksaan ini dan juga kepada BPK RI yang telah memberikan bimbingan kepada kami," jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna tetap mengingatkan agar eksekutif selalu taat dan patuh dengan peraturan perundang-undangan dalam mengelola keuangan daerah untuk pembangunan Buleleng. "Kami di DPRD sebagai mitra kerja, selalu memberi pengawasan. Dalam pembahasan APBD, kami juga ketat, dan selalu menekankan prinsip kehati-hatian," kata politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini. @ k19

Edisi : Sabtu, 2 Juni 2018

Hal : 4



## Hattrick Opini WTP, Bonus Menanti



BUPATI I Gusti Ayu Mas Sumatri saat menerima penghargaan WTP ketigakalinya untuk Pemkab Karangasem di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali, Senin (28/5).

### AMLAPURA, NusaBali

Pemkab Karangasem meraih hattrick (tiga kali berturut-turut) meraih opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. Bonus dari Kementerian Keuangan pun menanti. Bonus masih menunggu pembahasan APBN Perubahan 2018. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, di ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Senin (28/5).

Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, mengatakan bonus sudah pasti ada, hanya besarnya masih menunggu APBN Perubahan 2018. Menurut Bupati Mas Sumatri, sepanjang pemerintahan di Karangasem baru kali ini mampu menciptakan hattrick

opini WTP. Sebelumnya hanya meraih WTP satu kali. "Inilah pemerintahan kalau dilandasi semangat yang jujur, pemerintahan bersih dari korupsi, bersih dari pungli, tidak mengenal main mata dengan rekanan. BPK memberikan penghargaan WTP kepada Pemkab Karangasem, ya karena pemerintahan

yang bersih," jelas Bupati Mas Sumatri usai memimpin upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Lapangan Tanah Aron Amlapura, Jumat (1/6).

Dikatakan, Bupati/Wakil Bupati Karangasem mengawali bertugas, bersumpah di Pura Penataran Agung Besakih. Konsekuensinya mesti berani mempertanggungjawabkan secara sekala dan niskala. Apa yang diperiksa BPK itu adalah pertanggungjawaban administrasi secara sekala. Prestasi itu tidak lepas dari kerja keras seluruh OPD sehingga memunculkan pemerintahan yang bersih. Dikatakan, bonus opini WTP yang pernah didapatkan pada tahun 2016 sebesar Rp 7 miliar dan tahun 2017 sebesar Rp 35,25 miliar. Harapan di tahun 2018 sama dengan tahun 2017, bahkan bisa lebih. "Harapan kami bonusnya mencapai Rp 60 miliar," ungkap Bupati Mas Sumatri.

Diterangkan, bonus atas opini WTP berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), bersumber dari penyisihan penggunaan DAU (dana alokasi umum) pusat 1-2 persen setiap tahun. Terpisah, Inspektur pada Inspektorat Daerah Karangasem, I Wayan Sudarsana, mengatakan gelar tiga kali opini WTP mengisyaratkan bonus didapatkan meningkat. Hanya saja belum diberikan kepastian besaran bonus yang dikucurkan. Sebab masih menunggu pembahasan APBN. @k16

Informasi & Hiburan Masyarakat pas di hati

**RGS FM 100.10 Mhz**  
**(RADIONYA AMLAPURA BALI)**



**RGS FM**  
**RADIO SWARA GUNUNG SARI**  
RADIONYA AMLAPURA - BALI

**MEDIA RADIO PALING TEPAT PROMOSIKAN USAHA ANDA DI BALI TIMUR**

**PT. RADIO SWARA GUNUNG SARI FM**

ALAMAT RADIO, PEMANCAR, KANTOR: JLN. GUNUNG AGUNG 88 AMLAPURA KARANGASEM  
TELP STUDIO : (0363) 22789 IKLAN : (0363) 23622 FAX : (0363) 22900, 081338900095

Edisi : Sabtu, 2 Juni 2018

Hal : 8